

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang dalam pembinaan kerukunan umat beragama, belum berjalan dengan optimal. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang menjalankan peranannya sebagai berikut:
 - a. Memberikan bantuan penyediaan sarana dan prasarana terkait pembinaan kerukunan umat beragama dan dukungan dana.
 - b. Memberikan sosialisasi, dialog, edukasi dan pendidikan nilai toleransi pada masyarakat sesudah dan sebelum terjadinya konflik serta pembinaan pada tokoh agama sebagai agen perdamaian kerukunan umat beragama.
 - c. Pelaksanaan Kordinasi dengan berbagai pihak di bidang pembinaan kerukunan umat beragama.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang dalam pembinaan kerukunan umat beragama yaitu:
 - a. Keterbatasan Anggaran dan
 - b. Isu-isu pola beribadah dalam masyarakat di tempat yang bukan merupakan tempat ibadah.
3. Upaya yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang dalam mengatasi kendala-kendala dalam pembinaan kerukunan umat beragama yaitu :
 - a. Membangun Kinerja Kemitraan Strategis Kolaboratif Antar Lembaga dan Mengedepankan Program Strategis dan Berdampak

- b. Membangun komunikasi dalam berbagai bentuk dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat

B. Saran

1. Untuk Pemerintah Kota Padang diharapkan dapat menambahkan alokasi anggaran bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang, supaya dapat memaksimalkan program pembinaan kerukunan umat beragama dan menjangkau seluruh lapisan dalam masyarakat.
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang diharapkan dapat meningkatkan lagi intensitas dan kualitas dialog lintas agama, terkhusus pada tempat-tempat yang rentan terhadap konflik, dengan pendekatan inklusif dan melibatkan generasi muda.
3. Untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang agar kedepannya melakukan evaluasi rutin terkait program-program yang dijalankan, agar dapat diukur efektifitasnya dalam membangun kerukunan serta disesuaikan dengan dinamika sosial masyarakat.
4. Masyarakat Kota Padang diharapkan untuk lebih proaktif dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah kerukunan antar umat beragama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Azyumardi Azra, 2008, *Konflik Agama dan Upaya Penyelesaiannya di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, 2014, *Perencanaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Refika Aditama, Makassar.
- Alo Liliweri, 2001, *Gatra-Gatra Komunikasi Antar Budaya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dwi Santoso, 2012, *Pembinaan Masyarakat: Teori, Strategi dan Implementasi*, Alfabeta, Bandung.
- Erman Zaruddin, 2023, *Forum Kerukunan Umat Beragama Sebagai Pilar Penguatan Moderasi Beragama*, Pustaka Media Guru, Surabaya.
- Hasbullah Mursyid, 2008, *Kompilasi Kebijakan Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Antar Umat Beragama*, Puslitbang, Jakarta.
- Ikhsan Yosarie, Sayyidatul Insiyah, Nabhan Aiqani, Halili Hasan, 2024, *Indeks Kota Toleran Tahun 2024*, Cetakan ke-7, Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta.
- I Wayan Watra, 2015, *Filsafat Toleransi Beragama Di Indonesia (Perspektif Agama dan Kebudayaan)*, Paramita Surabaya, Surabaya.
- Imam Syaukani, 2008, *Komplikasi Kebijakan Dan Peraturan Perundang Undangan Kerukunan Umat Beragama*, Puslitbang, Jakarta.
- Jirhaduddin, 2010, *Perbandingan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muchammad Ali, 2017, *Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Syaiful Mujani, 2010, *Manajemen Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*, Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta.
- Said Agil Husain Al Munawar, 2003, *Fikih Hubungan Antar Agama*, Ciputat Press, Jakarta.

Sidik, 2020, *Kerukunan Umat Beragama*, Pesantren Anwarul Qur'an, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Penelitian Hukum: Sebuah Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.

Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

WJS. Poerwadarmita, 1980, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Adat

Peraturan Walikota Padang Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

C. Sumber Lain

Kiki Mayasaroh, Nurhasanah Bakhtiar, 2020, '*Strategi Dalam Membangun Kerukunan Antarumat Beragama Di Indonesia*', Jurnal For Islamic Studies, Volume III, Nomor 1.

Rizky P.P. Karo Karo, Indah Sriulina br. Ginting, 2023, '*Upaya Menjaga Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia Pada Media Sosial*', Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Volume IX, Nomor 3.

Winanda, 2015, Melalui Pembinaan Multikultural Kerukunan Umat Beragama Kita Tingkatkan Tri Kerukunan Umat Beragama di Kab. Gianyar. Diakses dari <https://bali.kemenag.go.id>

LAMPIRAN

A. Foto Wawancara Penelitian



B. Surat Keterangan Penelitian



PEMERINTAH KOTA PADANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Kompl. Perkantoran Balai Kota Padang
Jalan. Bagindo Aziz Chan No 1 By Pass Air Pacah Padang

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 200.1/543/KESBANGPOL-PDG/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Badan Kesbangpol Kota Padang, menerangkan bahwa :

Nama : Vicky Nasrul
Nomor Pokok Mahasiswa : 2010012111225
Fakultas : Hukum
Universitas : Bung Hatta Padang
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Alamat : Komplek Villa Bukit Permai Blok I No. 6 Padang

Nama tersebut diatas telah melaksanakan wawancara penelitian Moderasi Beragama di Badan Kesbangpol Kota Padang, sekaitan dengan penyelesaian skripsi dengan judul "Peranan Sekretariat Daerah Kota Padang Dalam Membina Kerukunan Umat Beragama".

Demikianlah surat keterangan ini kami berikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 29 Agustus 2025
Kepala Badan Kesbangpol Kota Padang



TARMIZI ISMAIL, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda/IV.C
NIP. 196803031989021003